

WATERSCHAP DENGKENG DI KLATEN TAHUN 1920-1942

WATERSCHAP DENGKENG IN KLATEN IN 1920-1942

Oleh: Khairunisa Putri Nurindah, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, khairunisa36@gmail.com

Abstrak

Wilayah Klaten pada kurun waktu 1920-1942 merupakan salah satu wilayah yang penting, karena Klaten merupakan daerah agraris yang sebagian besar tanahnya adalah untuk pertanian. Berkat tanahnya yang subur, Klaten merupakan salah satu tujuan bagi onderneming untuk menyewa tanah guna dijadikan perkebunan. Pada perkembangannya, tanah yang disewa oleh onderneming membutuhkan pengairan yang cukup untuk tanamannya, kemudian pemerintah Hindia Belanda berinisiatif untuk mendirikan *Waterschap Dengkeng* pada tahun 1922 untuk mengatur irigasi yang berada di wilayah Klaten. Munculnya *Waterschap Dengkeng* di Klaten mempengaruhi sistem kepemilikan tanah masyarakat Klaten. Setelah adanya *Waterschap Dengkeng*, kepemilikan tanah masyarakat Klaten menjadi semakin sempit karena onderneming semakin membutuhkan tanah yang luas untuk perkebunannya. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan peraturan sistem giliran untuk onderneming dan masyarakat Klaten. Selain itu, *Waterschap Dengkeng* juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Klaten. Hal ini disebabkan setelah adanya *Waterschap Dengkeng* banyak masyarakat Klaten yang beralih profesi menjadi buruh perkebunan karena lahan untuk pertaniannya telah disewakan, walaupun masih ada yang bertahan menjadi petani. Buruh perkebunan ini merupakan salah satu penentu dari hasil panen perkebunan di wilayah Klaten.

Kata kunci : *Waterschap Dengkeng, Klaten, 1920-1942*

Abstract

Klaten in the period 1920-1942 is one of the important areas, because Klaten is an agricultural area with most of the land for agriculture. Due to its fertile soil, Klaten is one of the destinations for onderneming to buy land for plantations. In its development, land leased by onderneming needed sufficient irrigation for its plants, then the Dutch East Indies government took the initiative to start the Dengkeng Waterschap in 1922 to access what was available in the Klaten region. The emergence of Dengkeng Waterschap in Klaten affected the Klaten community's land ownership system. After the Dengkeng Waterschap, Klaten community land ownership became increasingly limited because onderneming increasingly needed extensive land for its plantation needs. To overcome this, the Dutch East Indies government then implemented a replacement system for onderneming and the Klaten community. In addition, Dengkeng Waterschap also affects the lives of the people of Klaten. This happened after the Dengkeng Waterschap many Klaten people turned to farm laborers because agriculture had been leased, but there were still those who remained as farmers. One of the determinants of crop yields in the Klaten.

Keywords : *Waterschap Dengkeng, Klaten, 1920-1942*

Pendahuluan

Vorstenlanden merupakan wilayah kekuasaan raja yang terdiri dari Karesidenan Yogyakarta dan Karesidenan Soerakarta. Daerah *Vorstenlanden* dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sehari-sehari di sawah dan ladang. Oleh karena itu irigasi sangat diperlukan untuk mengairi sawah dan ladang mereka. Irigasi di Indonesia menjadi irigasi yang maju dan modern tidak lepas dari peran irigasi tradisional yang lebih dahulu ada. Irigasi modern muncul karena usaha memperbaiki atau merupakan pengembangan tradisi yang telah ada. Kebudayaan irigasi yang telah cukup lama ada di Indonesia adalah sistem irigasi subak di Bali dan irigasi-irigasi kecil di Jawa. Sistem irigasi subak merupakan perpaduan dari suatu masyarakat irigasi, unit produksi pertanian, badan usaha yang otonom dan masyarakat agama.¹

Sistem irigasi dengan teknologi yang modern muncul di Indonesia pada pertengahan abad XIX sampai abad XX dengan dicetuskannya politik etis oleh Deventer bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. Kemudian pada tanggal 17 September 1901 dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, Ratu Wilhelmina mengatakan, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bumiputera di Hindia Belanda. Oleh karena itu untuk membalas hutang budi tersebut, Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut kedalam kebijakan politik etis yang terdiri dari: (1) Irigasi atau pengairan yakni dengan membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian,

¹Effendi Pasandaran, *Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4.

(2) Imigrasi yaitu memindahkan penduduk atau bertransmigrasi, (3) Edukasi atau bidang pengajaran dan pendidikan.²

Perkebunan memegang peranan penting pada kondisi ekonomi masyarakat Klaten. Perkembangan saluran irigasi pun dipengaruhi oleh adanya perkebunan-perkebunan kolonial Belanda. Perkembangan saluran irigasi di Klaten dimulai dari saluran irigasi tradisional. Pembagian daerah-daerah irigasi menjadikan pengelolaan air menjadi lebih teratur. Keteraturan ini menguntungkan bagi pertumbuhan perkebunan, terutama perkebunan tebu. Tahun 1921, dibentuk pula badan otonom setengah resmi yang didirikan pertama di wilayah pengairan *Vorstenlanden* untuk Gubernur Yogyakarta yang dikenal sebagai *Waterschap Opak*, dan pada tahun 1924 badan pengairan Opak berkembang menjadi badan pengairan Opak Progo. Pada perkembangan selanjutnya, sekitar tahun 1922 didirikan badan pengairan di wilayah Gubernur Surakarta yang dikenal sebagai *Waterschap Bengawan* dan *Waterschap Dengkeng*. Bagi *Waterschap Dengkeng* letaknya berada di *Regentschap* Klaten.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengkaji mengenai keadaan umum yang terjadi di wilayah Klaten pada tahun 1920-1942. Adapun tujuan selanjutnya ialah mengenai perkembangan sistem irigasi *Waterschap Dengkeng* di Klaten, dan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh *Waterschap Dengkeng* di Klaten pada kurun waktu 1920-1942.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah merupakan suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah

²Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 51-55.

dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis terhadap data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya.³ Metode sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau manusia.⁴ Penelitian ini menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan penelitian menurut Kuntowijoyo yang digunakan pada penelitian ini antara lain; pengumpulan data (Heuristik), kritik sumber (Verifikasi), penafsiran (Interpretasi), dan penulisan sejarah (Historiografi).⁵

Heuristik merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan yang mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data atau materi sejarah. Tahap kedua kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Tahap ketiga interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta-fakta yang sudah diperoleh melalui tahap kritik sumber. Melalui tahap interpretasi kemampuan intelektual sejarawan benar-benar diuji dikarenakan tahapan ini sering dijadikan pemicu subjektivitas. Tahap terakhir historiografi merupakan proses menceritakan rangkaian fakta dalam sebuah bentuk tulisan yang bersifat historis, ditulis dengan kronologis berdasarkan hasil yang didapat peneliti

³Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 61.

⁴Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

⁵Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

setelah melewati tahap heuristik, kritik sumber dan interpretasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Geografis serta Demografi Wilayah Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu bagian wilayah Karesidenan Surakarta yang saat ini termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini terletak antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan.⁶ Kabupaten Klaten terletak sejak dari puncak gunung Merapi kemudian melebar ke arah tenggara sampai ke lembah Bengawan Solo. Wilayah Klaten di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan di sebelah barat dengan Kabupaten Sleman. Pada tahun 1847, Baron de Geer yang menjabat sebagai Residen Surakarta mengadakan reorganisasi terhadap peradilan dan polisi. Baron de Geer membagi Kasunanan Surakarta menjadi lima *Kabupaten Pulisi*, yaitu Klaten, Kartasura, Boyolali, Ampel dan Sragen. Tujuan dari dibentuknya *Kabupaten Pulisi* bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan jalan menentukan batas-batas wilayah kekuasaannya dan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kabupaten Pulisi dipimpin oleh seorang bupati pulisi, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala distrik dan kepala desa.⁷

Pada tahun 1903 dikeluarkan undang-undang desentralisasi, yang

⁶Badan Pusat Statistik, *Klaten Dalam Angka*, (Badan Pusat Statistik: Kabupaten Klaten, 1978), hlm. 27.

⁷Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 65.

kemudian mengubah sistem pemerintahan, residen berada di bawah gubernur jenderal dan berkuasa atas wilayah keresidenan yang dibantu asisten residen, asisten residen berkuasa atas afdeeling. Pada tahun 1920 luas wilayah Klaten adalah 458 km. Afdeeling Klaten secara administratif terbagi atas tujuh distrik, yaitu distrik Prambanan, Bayat, Klaten, Karangnongko, Ponggok, Delanggu dan Beji.⁸

Sejak dilaksanakannya perluasan perkebunan pada awal abad ke-19, Klaten merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat koordinasi ekonomi di Karesidenan Surakarta. Hal tersebut dipengaruhi dengan letak Klaten yang sangat strategis dan mudah dijangkau dari segala penjuru, karena tersedianya sarana transportasi jalan dan juga daerah Klaten dilalui oleh jalan kereta api yang telah dibangun sejak tahun 1864 untuk menghubungkan Yogyakarta dengan Semarang. Seperti umumnya wilayah di Indonesia, wilayah Klaten beriklim tropis. Dengan variasi antara bulan April-Oktober musim kemarau, dan bulan oktober sampai april musim penghujan. Curah hujan tahunan di Klaten rata-rata 1500-2500 mm. Suhu rata-rata daerah Klaten berkisar antara 28-30 C.

Beberapa wilayah di Klaten memiliki keadaan tanah yang sifatnya berlain-lainan. Daerah sekitar gunung merapi yaitu daerah Kabupaten Klaten sebelah barat laut yang meliputi daerah Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, sebagian daerah Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Jogonalan, tanahnya terdiri dari pasir yang tercampur dengan tanah ladu. Jenis tanah semacam ini hanya cocok ditanami dengan kacang tanah, kedelai, kacang panjang, jagung, ketela rambat

dan sebagainya. Tanah yang 100% merupakan tanah pasir dengan tidak tercampur tanah ladu ialah daerah-daerah yang kerap kebanjiran dari sungai-sungai pasir dan daerah ini lebih cocok ditanami waluh dan buah semangka. Daerah sebelah selatan, yakni daerah Kecamatan Bayat, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Wedi bagian selatan, memiliki tanah lincat. Tanah lincat pada musim kemarau hanya cocok ditanami jagung dan cantel, tetapi pada musim penghujan tanah-tanah seperti ini baik sekali ditanami padi. Kecamatan Bayat dan Kecamatan Cawas yang berbatasan dengan Gunung Kidul, tanah disini berjenis tanah kapur, yang cocok ditanami jagung, cantel dan koro.

Setelah mengetahui keadaan geografis wilayah Klaten, kemudian dapat kita lihat keadaan demografinya. Penduduk Klaten dapat dikatakan bersifat heterogen, orang Jawa atau pribumi merupakan yang terbanyak dan sebagian besar tinggal di pedesaan, sedangkan orang Eropa, Cina dan Arab tinggal di kota-kota. Tahun 1915, wilayah Klaten merupakan wilayah yang terpadat di Karesidenan Surakarta. Penduduk Klaten berjumlah kurang lebih 479.450 jiwa yang terdiri dari 1250 jiwa orang Eropa, 2200 jiwa orang Cina dan 476.000 jiwa penduduk pribumi.

Tahun 1917, jumlah penduduk Klaten bertambah menjadi 487.300 jiwa dengan rincian, yaitu penduduk pribumi berjumlah 483.860 jiwa, penduduk Eropa berjumlah 1.145 jiwa dan kebangsaan lainnya berjumlah 2.295 jiwa. Jumlah tersebut semakin meningkat pada tahun 1920 menjadi 798.693 jiwa, dengan orang Eropa berjumlah 1.870 jiwa, penduduk pribumi 793.988 jiwa dan penduduk dari Asia lainnya (Cina dan Arab) berjumlah 2.835 jiwa. Angka pertambahan penduduk tiap tahun di kelima kawedanan di wilayah Klaten adalah sebagai berikut; Kawedanan kota Klaten sebanyak 1,2%,

⁸Hery Purwanto, Pengaruh Islam Abangan Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Klaten (1919-1920), *Skripsi*: UNY, 2005, hlm. 26.

Kawedanan Delanggu sebanyak 1,15%, Kawedanan Jatinom sebanyak 1,25%, Kawedanan Pedan sebanyak 1,14%, dan Kawedanan Gondangwinangun sebanyak 1,3%.

B. Awal Pembangunan Sarana Irigasi

Dalam memandang persoalan irigasi di masa kolonial terlebih pada di berlakukannya politik etis, sebenarnya memiliki tujuan lain yaitu pada saat itu sedang terjadi ekspansi industri perkebunan sehingga membutuhkan irigasi yang lebih modern. Pembangunan irigasi di masa kolonial Belanda pada dasarnya dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama masa tahun 1830-1885, yang merupakan masa pembangunan fisik bangunan utama, kemudian tahap kedua, yakni tahun 1885-1920 merupakan tahap jaringan irigasi secara utuh dan tahap ketiga periode 1920-1942, yang merupakan tahap pelaksanaan sistem secara mantap.⁹

Tahap pertama sebenarnya bukan pembangunan fisik dari awal, melainkan mengembangkan serta meningkatkan secara teknis apa yang telah dibangun oleh penduduk pribumi sebelumnya. Kemudian pada tahap kedua mulai dikenalkan dasar-dasar tata cara operasi dan pemeliharaan irigasi beserta institusi pelaksanaannya mulai diletakkan oleh Departemen Pekerjaan Umum *Gubernemen*. Ciri yang khas dari pelaksanaan dan pemeliharaan irigasi masa kolonial adalah sistem pembagian air irigasi dengan jadwal pengaturan siang (perkebunan tebu) dan malam (tanaman padi milik petani). Pada tahap terakhir yakni tahap ketiga persoalan operasi dan pemeliharaan sangat menonjol. Kekurangan air semakin besar karena semakin banyaknya pabrik gula yang dibangun, maka dibangunlah

bendungan-bendungan besar dan waduk-waduk lapangan untuk mengairi tanaman tebu pada saat terjadi kekurangan air.¹⁰

Pembangunan sarana irigasi jelas ditujukan untuk mendukung prasana industri perkebunan Belanda, namun kepentingan pengairan sawah penduduk juga tidak kalah pentingnya. Pertanian padi di Jawa pada saat itu memerlukan irigasi yang intensif, terutama pada periode kemarau tahunan. Hanya irigasi sungai (melalui sistem gravitasi) sangat relevan untuk dilaksanakan di Hindia Belanda. Skema irigasi ini memiliki keuntungan yang sangat berguna bagi pengelohan pertanian karena endapan lumpur yang kaya akan mineral yang di butuhkan lahan-lahan pertanian dapat ikut terbawa arus air yang dialirkan melalui irigasi sungai.¹¹ Sistem irigasi tradisional milik pribumi umumnya memiliki sumber air yang berasal dari bendungan sementara yang terbuat dari susunan batu kerikil dengan sekat bambu untuk melindungi agar tidak hanyut. Kemudian kanal-kanal di cabangkan, dan dibuatlah *tangent slide* dari material campuran tanah, bambu dan ranting dan daun untuk menghantarkan air ke dalam percabangan yang kemudian tersalurkan merata ke teras-teras sawah melalui pipa bambu hingga dibiarkan mengalir kebawah menuju ke pintu air pembuangan.¹² Irigasi sederhana ini memiliki kelemahan yakni mudah rusak, atau bahkan lenyap ketika musim hujan deras dan petani tidak bisa mengontrol kelebihan air melalui drainase juga masih minim. Maka dari itu oleh pemerintah Hindia Belanda perlu dilakukan pembaharuan sistem irigasi

¹⁰*Ibid.*, hlm. 3-4.

¹¹J. Stroomberg, *Hindia Belanda 1930*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 226.

¹²*Ibid.*, hlm. 227.

⁹Tim BPAD, *Tata Kelola Pengairan di Yogyakarta dan Surakarta 1926-1933: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BPAD DIY, 2014), hlm. 2.

dan juga pembangunan sarana irigasi yang lebih modern.

Tahun 1885 yang merupakan tahap pertama pembangunan irigasi, dibentuklah suatu biro terpisah dibawah Departemen Pekerjaan Umum untuk melakukan pengembangan desain dan konstruksi sistem irigasi pertanian di Hindia Belanda. Area yang hendak disasar pengairan dibagi ke dalam bidang-bidang sekunder dengan kisaran luasan area sekitar 100 hektar (standar perkiraan cakupan pengairan yang diproyeksikan oleh pemerintah). Suatu bangunan pengalihan arus air kemudian dibangun di sungai yang menjadi sumber pengairan, terdiri atas; sebuah bendungan dan satu atau lebih pintu air utama yang dibuat dengan gerbang geser untuk mengatur air. Air dari kanal utama akan disadap oleh kanal-kanal cabang. Kanal cabang ini merupakan parit yang berfungsi untuk mengalirkan air ke lahan-lahan pertanian. Namun sistem ini tidak lama dipakai kemudian diganti dengan penggabungan sistem suplai air dan sistem drainase secara bersamaan.

Mulai tahun 1926 manajemen dan perawatan irigasi (mulai dari kanal irigasi, drainase, hingga bangunan-bangunan kontrol banjir) mulai dikerjakan atas nama pemerintah Hindia Belanda. Dinas khusus pun dibentuk untuk mengurus irigasi di Jawa dan Madura. Dinas tersebut terbagi menjadi dua, yakni Dinas Eksploitasi, yang memberi perhatian pada konstruksi, manajemen dan perawatan, serta Dinas Konstruksi, yang mengurus bangunan-bangunan besar.¹³

Komisi Irigasi dibentuk tahun 1920 yang di dalamnya diisi oleh Asisten Residen, seorang insinyur irigasi, seorang ahli pertanian pejabat, dan satu atau lebih pegawai Dinas Sipil Pribumi. Salah satu komisi irigasi yaitu *Vorstenlandsche Waterschappen*, merupakan lembaga pengairan yang berada di bawah Struktur *Departemen*

Verkeer en Waterstaat yang berkedudukan di Bandung. Sedangkan lembaga yang secara khusus mengurus masalah irigasi untuk wilayah *Vorstenlanden* pada masa itu adalah *Centraal Waterschapkantoor voor de Vorstenlanden*. Lembaga ini kemudian berubah nama menjadi *Vorstenlandsche Waterschappen*. Lembaga ini mengurus masalah irigasi yang terdiri dari *Waterschap "Opak-Progo"*, *Waterschap "Dengkeng"* dan *Waterschap "Bengawan"*. Untuk daerah *Gubernemen* Jogjakarta adalah *Waterschap "Opak-Progo"* yang berlokasi di Jalan *Kweekschool* Jogjakarta tepatnya di Jetis. Sedangkan untuk wilayah *Regenschap* atau Kabupaten Klaten adalah *Waterschap Dengkeng*. *Waterschap* Dengkeng berlokasi di desa Dengkeng, Wedi, Klaten. *Waterschap* merupakan Jawatan pengairan guna mengelola urusan pengairan di wilayah Klaten.

C. Perkembangan *Waterschap Dengkeng* Tahun 1920-1942

Perkebunan memegang peranan penting pada kondisi ekonomi masyarakat Klaten. Perkembangan saluran irigasi pun dipengaruhi oleh adanya perkebunan-perkebunan kolonial Belanda. Perkembangan saluran irigasi di Klaten dimulai dari saluran irigasi tradisional. Sebelum adanya irigasi teknis, rakyat menggunakan sistem irigasi sederhana untuk mengaliri sawahnya. Mereka menggunakan irigasi gravitasi, dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk pengaliran airnya, dengan prinsip air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah karena adanya gravitasi.

Pada perkembangannya, jaringan-jaringan irigasi dibangun lebih baik guna kebutuhan tanaman di area perkebunan-perkebunan di wilayah *Vorstenlanden*. Di wilayah bagian Kasunanan Surakarta, yaitu wilayah Klaten, menjadi salah satu wilayah yang

¹³*Ibid.*, hlm. 234.

penting bagi perusahaan perkebunan dan pembuatan saluran irigasi. Perkebunan-perkebunan di Klaten menanam tanaman komersil, seperti tebu. Sistem penanaman tebu di perkebunan ini dilakukan dengan cara bergiliran dengan tanaman padi. Sistem ini dinamakan Glebagan, mengingat penanaman padi sama dengan penanaman tebu, yaitu ditanam di sawah. Jadi penanaman tebu di perkebunan-perkebunan di Klaten digilir dengan padi milik masyarakat sebab penanaman tebu dilakukan di ekosistem yang sama dengan padi, yaitu sawah.¹⁴

Irigasi sangat menentukan berhasilnya panen tebu dalam suatu perkebunan, karena irigasi yang diatur dengan baik akan menyebabkan tanaman tebu yang ditanam dapat tumbuh dengan subur. Pendirian perusahaan perkebunan di Klaten juga dilengkapi dengan jaringan irigasi. Hal itu dikarenakan penanaman tanaman komersil, seperti tebu dan padi di areal persawahan memerlukan air yang cukup baik, dengan pengairan yang baik lahan perkebunan di Klaten akan berkembang dengan baik dan berlangsung lama. Di wilayah Klaten ini juga didominasi oleh perkebunan tanaman-tanaman ekspor. Perkebunan-perkebunan di wilayah Klaten pada masa ini awalnya tidak begitu luas, tetapi sekitar tahun 1840-an produksi gula mulai merambah dalam skala menengah dan penanaman tanaman lain, seperti tembakau berkembang pesat. Perkebunan di Klaten berkembang pesat di wilayah sekitar kota, khususnya di sebelah barat dan selatan kota.¹⁵

¹⁴ Clifford Geertz, *Inovasi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1983), hlm. 56-57.

¹⁵ Effendi Pasandaran dan Donald C. Taylor, *Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi jilid II*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

Sejak adanya tanam paksa, pemerintah Hindia Belanda secara intensif mulai membangun bendung/bendungan dan jaringan irigasi di pulau Jawa yang pada dasarnya untuk mengamankan dan menunjang sistem tanam paksa, pembangunan jaringan irigasi pada saat tersebut dikelola langsung oleh *Binnenlandsch Bestuur* (BB) dan dibantu oleh para Bupati sebagai penguasa di daerah. Pada tahun 1854, pengelolaan irigasi dialihkan pada lembaga baru. Pemerintah kolonial Belanda mulai menyadari perlunya lembaga irigasi teknis, maka dibentuklah Brigade Irigasi dan Departemen Pekerjaan Umum yang disebut dengan *Departement Der Burgelijke Openbare Werken* (B.O.W.). Maka tugas Departemen B.O.W. dan bagian irigasi salah satunya ialah pada 1 Januari 1889 membentuk kantor-kantor irigasi, meliputi daerah yang masing-masing dianggap sebagai kesatuan wilayah pengairan dan dalam praktiknya merupakan kumpulan daerah-daerah aliran sungai.¹⁶

Bagi wilayah Klaten sumber air diperoleh melalui aliran air dari sungai Dengkeng, irigasi ini diterapkan dari aliran air di wilayah Dengkeng menuju ke wilayah-wilayah warga yang tanahnya lebih rendah. Kelembagaan wilayah pengairannya pun dikelompokkan menjadi satu dengan wilayah lain yang memiliki aliran air yang sama. Wilayah-wilayah pengairan tersebut ternyata tidak sama dengan wilayah administrasi pemerintahan. Kepala bagian irigasi adalah seorang insinyur yang berpengalaman dan dibantu oleh beberapa insinyur yang lebih muda beserta sejumlah teknisi menengah. Dalam hal ini kemudian

1988), hlm 6.

¹⁶ Jasper, J.E., *Memori Serah Jabatan 1921-1930; Jawa timur dan Tanah Kerajaan*, (Jakarta: ANRI, 1978), hlm. CCLXX.

mereka mendirikan departemen yang khusus untuk mengurus jalan, jembatan, tanggul-tanggul, dan selokan-selokan yang disebut *Department der burgerlijke Openbare Werken*, kemudian pada tahun yang sama terjadi perubahan menjadi *Departement Verkeer en Waterstaat*. Di bawah struktur *Department van Verkeer en Waterstaat* terdapat *Centraal Waterschap Kantoor C.W.K.* yang merupakan lembaga yang mengurus perihal pengairan yang dibentuk pada 13 Desember 1919. Pembentukan *Centraal Waterschap Kantoor* ini hanya bersifat sementara, karena hanya mengatur pengairan selama *Water Reglement* belum disahkan. Pada waktu *Water Reglement* telah disahkan, *Centraal Waterschap Kantoor* dikukuhkan sebagai lembaga teknis dan juga menjadi badan penasihat bagi badan pengairan dan gubernemen.¹⁷

Pembagian daerah-daerah irigasi menjadikan pengelolaan air menjadi lebih teratur. Keteraturan ini menguntungkan bagi pertumbuhan perkebunan, terutama perkebunan tebu. Tahun 1921, dibentuk pula badan otonom setengah resmi yang didirikan pertama di wilayah pengairan *Vorstenlanden* untuk Gubernemen Yogyakarta yang dikenal sebagai *Waterschap Opak*, dan pada tahun 1924 badan pengairan Opak berkembang menjadi badan pengairan Opak Progo. Pada perkembangan selanjutnya, sekitar tahun 1922 didirikan badan pengairan di wilayah Gubernemen Surakarta yang dikenal sebagai *Waterschap Bengawan* dan *Waterschap Dengkeng*. Bagi *Waterschap Dengkeng* letaknya berada di *Regentschap Klaten*. Dalam tingkat *Vorstenlanden* lembaga ini dikenal sebagai *Vorstenlansche Waterschapraden*. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh *voorsiter*.

Waterschap Dengkeng sendiri didirikan di *Regentschap Klaten* pada tahun 1922 yang wilayah pengairannya

dipusatkan untuk perkebunan tebu di Klaten. Bagi *Waterschap Klaten*, wilayah kerjanya meliputi 64.200 bau termasuk kurang lebih 27 perkebunan. Dalam pembagian wilayahnya, meliputi eksploitasi ruang lingkup wilayah utara, yaitu mulai dari gunung Merapi, lembah sungai Kadapiro dan sungai Pusur, sungai Brambang, hingga perbatasan *afdeeling Klaten* dan Boyolali. Bagi wilayah selatan, yaitu mulai dari lembah sungai Nglumbe di Baderan ke sungai Brambang. Kemudian di wilayah timur mulai dari Lembah sungai Bengawan, Dengkeng, hingga batas selatan antara wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan untuk wilayah barat berbatasan dengan daerah tangkapan sungai Progo.¹⁸

Tahun 1921, untuk pertama kalinya dibangun Dam di daerah sungai Jlantah di Jombor, *afdeeling Klaten* dan pada 1922 dibangun Dam di Bajran dengan menghabiskan dana sekitar f 67.000. Tahun 1922 ketika telah didirikan *Waterschap Dengkeng*, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun waduk Delingan di Tirtomarto dan selesai pada September 1922. Pada perkembangannya, waduk tersebut sangat berguna untuk fasilitas irigasi di sekitar pabrik gula Tasikmadu. Pada April 1926, pembangunan waduk Jombor, Klaten telah selesai, waduk ini sangat dibutuhkan karena daerah Jombor, Klaten ketika musim panas sering mengalami masalah kekurangan air, khususnya untuk pertanian.¹⁹ Sumber air yang dikelola oleh *Waterschap Dengkeng* mengalir dari daerah-daerah seperti yang telah dijelaskan di atas. Adapun wilayah-

¹⁸Machmoed Effendhie, *Waterschappen Irrigation Agencies) Management in Vorstenlanden Surakarta and Yogyakarta, 1900-1942*, *Jurnal Humaniora*, vol 2 no. 2, Juni 2017, hlm 153-154.

¹⁷*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

wilayah yang memiliki Dam dan waduk yang lainnya, seperti Dam Dengkeng, Dam Kaligawe Pedan, Waduk Ponggok, Waduk Taman, dan lain-lain. Sarana irigasi tersebut kebanyakan dialirkan ke perkebunan-perkebunan tebu milik *onderneming* dan sebagian ke pertanian masyarakat Klaten.²⁰ Mengenai persoalan mata air, *Waterschap Dengkeng* hanya menggunakan 800 liter air dari 1000 liter mata air yang mengalir, kemudian untuk sisanya, yaitu 200 liter akan dibiarkan mengalir untuk kepentingan umum tanpa dikelola atau dimanfaatkan oleh *Waterschap Dengkeng*. Hal ini seperti yang tertulis dalam alinea penutup pasal 10 V.W.O dan pasal 10.c.²¹

Sistem pengairan di *onderneming* Klaten diatur oleh Dewan Pengairan yang bertugas untuk mengatur pembagian air antara perusahaan perkebunan dan masyarakat pribumi, antara perkebunan yang satu dengan yang lain. Pengaturan pengairan di desa diurus oleh kelurahan-kelurahan. Pengairan yang diurus oleh pemerintah desa hanya untuk kepentingan pengairan penduduk saja. Kepala pemerintahan daerah dalam mengatur pengairan harus melalui perundingan dengan patih dari pemerintahan *swapraja* (*Zelfbestuur*). Tugas tersebut meliputi pengairan, pembagian, penyaluran, pembangunan saluran air, dan penanggulangan pasir di daerah, seperti sungai, waduk dan saluran air. Kepentingan ini harus diperhatikan oleh pihak perusahaan perkebunan. Paling tidak kepentingan itu diperhatikan oleh salah satu pihak dari pihak perusahaan perkebunan atau penduduk pribumi. Kepala pemerintahan daerah adalah wakil dari patih yang

turun langsung ke daerah untuk mengawasi pekerjaan pengairan.²²

D. Pengaruh Saluran irigasi *Waterschap Dengkeng* di Klaten

Pada musim penghujan, daerah Klaten tanaman-tanaman warnanya hijau segar, namun ketika memasuki musim kemarau warnanya layu dan kering, sumber-sumber air seperti sungai pun mulai mengering. Akibatnya tidak jarang terjadi kekurangan pangan, sehingga pangan harus di datangkan ke daerah Klaten. Bagi penduduk pribumi, mereka mendapatkan uang dari pemberian upah kerja dalam pelaksanaan pekerjaan umum. Banyaknya permasalahan-permasalahan mengenai pengairan, membuat pemerintah Hindia Belanda segera membentuk badan pengairan (*waterschap*) guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Di wilayah Klaten, *waterschap* didirikan di sekitar aliran sungai Dengkeng. Hasil dari didirikannya *Waterschap Dengkeng* ialah sedikit banyak dapat mengatasi kekeringan di *onderneming* Klaten.²³

Keadaan ini menjadi indikasi bahwa kurangnya sarana irigasi menjadi hambatan utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan di saat musim kemarau, dan menjadi salah satu faktor penghambat dalam usaha meningkatkan hasil pertanian. Cuaca memang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman-tanaman. Adanya reboisasi dan didirikannya sarana irigasi, seperti *Waterschap Dengkeng* sedikit demi

22Arsip BPAD DIY No. 262/A tanggal 26-2-1925 tentang saran dan pendapat dari insinyur kantor pusat jawatan pengairan.

23Metz, Th.M., *Seorang Praja Jawa, Beberapa Pandangan Sehubungan dengan Jubileum Pemerintahan Sri Mangkunegara VII*, (Reksopustoko Mangkunegaran, 1939), hlm. 54.

20Kumpulan Arsip BPAD mengenai jawatan perairan di vorstenlanden tahun 1926, hlm 203-23.

21*Ibid.*, hlm 69.

sedikit mampu memperbaiki merosotnya hasil panen. Oleh karena itu, tugas dari *Waterschap Dengkeng* ialah mengatur aliran air supaya dapat mengalir pelan-pelan melalui *onderneming* dan menyimpan persediaan air untuk musim kemarau. Selain itu, pengairan yang dilakukan oleh *Waterschap Dengkeng* juga berguna sebagai sarana pemupukan.

Adanya jaringan irigasi yang kemudian diperketat dengan didirikannya *Waterschap Dengkeng* di Klaten juga mempengaruhi sistem kepemilikan tanahnya. Dibangunnya jaringan irigasi menyebabkan kepemilikan tanah penduduk pribumi menjadi semakin sempit, dan penduduk pribumi mau tidak mau harus menggilir tanahnya setiap dua tahun dengan pihak perkebunan.²⁴ Hal ini disebabkan karena para petani pribumi kecil yang tidak terorganisasi selalu kalah menghadapi perkebunan-perkebunan besar milik *onderneming* yang didukung oleh pemerintah, seperti dalam hal pengairan irigasi.²⁵

Dalam hubungannya dengan irigasi, konflik yang timbul setelah dibangunnya jaringan irigasi di beberapa daerah di Klaten ialah ketika kebutuhan tanah untuk perkebunan semakin meluas. Ini dikarenakan setelah adanya jaringan irigasi modern pihak perkebunan atau *onderneming* semakin gencar dalam menanam tanaman tebu, sehingga pihak perkebunan membutuhkan tanah yang lebih luas, kemudian tanah para petani yang menjadi sasarannya. Dampaknya tanah pertanian milik petani di Klaten menjadi semakin sempit. Bukti dari kejadian tersebut salah satunya terjadi di wilayah Klaten, tepatnya di daerah Gedaren, Ngupit dan Ketandan sekitar tahun 1919. Tanah yang disewakan kepada

pihak perkebunan setiap tahun semakin besar, sehingga para petani hanya mengelola sisa dari tanah yang disewakan tersebut.²⁶ Akibat sistem kepemilikan tanah yang timpang tersebut, kerusakan pun sering terjadi di perkebunan tebu di Klaten, sebagai aksi ketidakpuasan para petani Klaten terhadap peraturan mengenai perairan yang diberlakukan oleh *Waterschap Dengkeng*.²⁷

Eksplorasi lahan sebenarnya tidak dapat terlepas dari keberadaan sarana irigasi yang membuat tanah-tanah menjadi subur. Irigasi telah terbukti mampu memacu produksi perkebunan tebu di Klaten. Seperti halnya pendirian *Waterschap Dengkeng* di Klaten. Pendirian *Waterschap Dengkeng* oleh pemerintah Hindia Belanda telah memberikan manfaat yang begitu besar sejak diresmikan pendiriannya. *Waterschap Dengkeng* sedikit banyak telah menanggulangi masalah kegagalan panen, khususnya di perkebunan tebu milik pemerintah. Dalam hal ini dapat dibuktikan dari kenaikan produksi tebu di Klaten selalu mengalami peningkatan dalam kurun tahun 1890, 1900, 1920, dan 1930, yaitu 203 ton, 520 ton, 829 ton, 1.577 ton.²⁸

Adanya *Waterschap Dengkeng* telah memberikan arti yang demikian besarnya bagi perkebunan tebu. Apabila ditarik ke belakang, riwayat pengairan pada perkebunan tebu sebelumnya seringkali menemui permasalahan mengenai mundurnya waktu tanam dan

²⁶Machmoed Effendhie, *Waterschappen Irrigation Agencies) Management in Vorstenlanden Surakarta and Yogyakarta, 1900-1942*, *Jurnal Humaniora*, vol 2 no. 2, Juni 2017, hlm 153-154.

²⁷Selo Soemardjan, *loc. cit.*

²⁸Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 16.

²⁴*Ibid.*, hlm 55.

²⁵Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: UGM Press, 1991), hlm 227.

kekurangan air. Tetapi setelah didirikannya *Waterschap Dengkeng*, permasalahan-permasalahan tersebut mulai berkurang, dan suasana di kalangan penduduk berangsur-angsur mulai membaik, meskipun sebenarnya masih banyak permasalahan mengenai sistem yang dianggap timpang. Hal ini dapat dilihat di *Waterschap Dengkeng* di Klaten, di mana persaingan untuk memperoleh saluran irigasi yang layak semakin besar dan rumit.

Misalnya saja yang terjadi di daerah Gedaren, Klaten, akibat tidak adilnya pembagian pengairan oleh pengelola pengairan, ketika musim kemarau berkepanjangan banyak terjadi pembakaran lahan tebu. Hal ini disebabkan oleh dua factor, pertama yaitu factor alam karena daun tebu yang sangat kering dan mudah terbakar dengan sedikit gesekan. Kedua ialah factor dari manusia, dalam hal ini ialah petani Klaten yang diperlakukan tidak adil dalam pemebagian air, sehingga mereka melakukan protes, salah satunya dengan pembakaran lahan tersebut. Padahal ketika musim kemarau panjang, para petani membutuhkan cukup asupan air supaya tanaman mereka tidak gagal panen.²⁹

Sistem irigasi ekstensif yang dibangun untuk industry gula sangat berdampak bagi masyarakat Klaten, karena masyarakat Klaten, khususnya petani menjadi tidak dapat menanam tanaman padi dan palawija dengan semestinya, produksi panennya pun menjadi menurun dan kualitasnya kurang baik. Ini terjadi karena pengairannya tidak stabil dan waktu tanamnya pun sangat singkat akibat dari sewa lahan oleh *onderneming*, kasus yang terjadi di Dam Senden di daerah Ngupit dan Ketandan adalah salah satu buktinya.³⁰

²⁹Selo Soemardjan, *op. cit.*, hlm. 229.

³⁰Selo Soemardjan, *loc. cit.*

Hubungan antara padi, tebu dan tenaga kerja pun sangat erat sekali. Sawah yang ditanami tebu dengan fasilitas irigasi yang modern akan mendapatkan hasil yang baik dibandingkan dengan sawah yang tidak ditanami tebu. Di daerah tebu tersebut jika ditanami padi, hasil padinya akan meningkat pula. Keberhasilan penanaman tebu oleh pihak perkebunan akan meluaskan daerah penanamannya. Lahan perkebunan tebu yang semakin luas akan memerlukan banyak tenaga kerja untuk mengerjakan penanaman tebu, sehingga tenaga kerja dari luar akan terserap ke daerah *onderneming* gula. Penyerapan tenaga kerja ke daerah perkebunan tebu juga disebabkan karena hasil beras di daerah gula lebih tinggi dibandingkan di daerah yang bukan gula. Contohnya ialah di daerah Delanggu, Klaten, daerah ini merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Jawa hingga kini dan menjadi salah satu daerah perkebunan penghasil tebu pula.³¹ Daerah ini juga dialiri irigasi yang sangat cukup untuk pertumbuhan tanamannya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah yang ditanami tebu juga berdampak kepada hasil panen beras yang memadai. Ini yang menarik perhatian para tenaga kerja untuk bekerja di sana guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.³²

Penyerapan tenaga kerja ke daerah perkebunan tebu menyebabkan jumlah kepadatan penduduk semakin melambung tinggi. Pertambahan penduduk yang semakin tinggi itu sebenarnya merugikan bagi penduduk

³¹Theresia Trisundari, *Tata Kelola Pengairan di Yogyakarta dan Surakarta 126-1933 Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BPAD DIY, 2014), hlm. 27.

³²Clifford Geertz, *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, (Jakarta: Bhratara, 193), hlm. 62-63.

yang ada di *onderneming* tersebut. Padi yang dihasilkan memang tinggi di daerah gula, tetapi dengan penambahan jumlah penduduk yang tinggi, jumlah padi yang ada tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk di kawasan itu.³³ Dengan adanya hal tersebut, walaupun hasil padi di daerah gula lebih tinggi dibandingkan daerah bukan gula, tetapi pendapatannya hampir sama dengan penduduk yang berada di daerah bukan gula, bahkan terkadang bisa lebih rendah daripada daerah bukan gula bila pasaran gula sedang turun. Hal tersebut adalah salah satu pemicu meluasnya kemiskinan di Jawa, khususnya di wilayah Klaten. Ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Clifford Geertz, yaitu *Shared of Poverty* atau pemerataan kemiskinan.³⁴ Jadi dari beberapa uraian tersebut, antara padi, tebu dan tenaga kerja memang sangat berhubungan erat.

Kesimpulan

Kabupaten Klaten merupakan salah satu bagian wilayah Karesidenan Surakarta yang saat ini termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten merupakan daerah agraris di mana sebagian besar tanahnya adalah untuk bertani. Oleh karena itu penduduknya kebanyakan terdiri dari para petani yang mata pencahariannya bertani. Petani di daerah Klaten dibagi dalam beberapa macam petani, yaitu petani kenceng, petani setengah kenceng, petani gundul, petani ngindung, petani templek, dan petani tlosor. Pada paruh pertama abad ke-20, pelaku usaha bergeser dari pemerintah kolonial ke pengusaha swasta. Modal yang ditanamkan oleh kalangan swasta barat. Letak daerah Klaten yang berada di barat daya Surakarta, terdiri dari dataran rendah yang kaya akan mata air sangat cocok untuk dijadikan sebagai

wilayah perkebunan, sehingga wilayah Klaten menjadi salah satu wilayah yang banyak yang disewa oleh *onderneming* untuk menanam tanaman tebu yang sangat menguntungkan pada waktu itu.

Perkebunan memegang peranan penting pada kondisi ekonomi masyarakat Klaten. Perkembangan saluran irigasi pun dipengaruhi oleh adanya perkebunan-perkebunan kolonial Belanda. Perkembangan saluran irigasi di Klaten dimulai dari saluran irigasi tradisional. Pada perkembangannya, jaringan-jaringan irigasi dibangun lebih baik guna kebutuhan tanaman di area perkebunan-perkebunan di wilayah Vorstenlanden. Bagi wilayah Klaten sumber air diperoleh melalui aliran air dari sungai Dengkeng, irigasi ini diterapkan dari aliran air di wilayah Dengkeng menuju ke wilayah-wilayah warga yang tanahnya lebih rendah. Tahun 1919, terdapat *Centraal Waterschap Kantoor C.W.K.*) yang merupakan lembaga yang mengurus perihal pengairan.

Waterschap Dengkeng sendiri didirikan di *Regentschap* Klaten pada tahun 1922 yang wilayah pengairannya dipusatkan untuk perkebunan tebu di Klaten. Bagi *Waterschap* Dengkeng, Klaten dalam pembagian wilayahnya, meliputi eksploitasi ruang lingkup wilayah utara, yaitu mulai dari gunung Merapi, lembah sungai Kadapiro dan sungai Pusur, sungai Brambang, hingga perbatasan *afdeeling* Klaten dan Boyolali. Bagi wilayah selatan, yaitu mulai dari lembah sungai Nglumbe di Baderan ke sungai Brambang. Kemudian di wilayah timur mulai dari Lembah sungai Bengawan, Dengkeng, hingga batas selatan antara wilayah Surakarta dan Yogyakarta. sedangkan untuk wilayah barat berbatasan dengan daerah tangkapan sungai Progo. Mengenai persoalan mata air, *Waterschap* Dengkeng hanya menggunakan 800 liter air dari 1000 liter mata air yang mengalir, kemudian

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, hlm. 108-109.

untuk sisanya, yaitu 200 liter akan dibiarkan mengalir untuk kepentingan umum tanpa dikelola atau dimanfaatkan oleh Waterschap Dengkeng.

Hasil dari didirikannya Waterschap Dengkeng ialah sedikit banyak dapat mengatasi kekeringan di onderneming Klaten. Didirikannya sarana irigasi, seperti Waterschap Dengkeng sedikit demi sedikit juga mampu memperbaiki merosotnya hasil panen. Adanya jaringan irigasi yang kemudian diperketat dengan didirikannya Waterschap Dengkeng di Klaten juga mempengaruhi sistem kepemilikan tanahnya. Dibangunnya jaringan irigasi menyebabkan kepemilikan tanah penduduk pribumi menjadi semakin sempit, dan penduduk pribumi mau tidak mau harus menggilir tanahnya setiap dua tahun dengan pihak perkebunan atau onderneming.

Dalam hubungannya dengan irigasi, konflik yang timbul setelah dibangunnya jaringan irigasi di beberapa daerah di Klaten ialah ketika kebutuhan tanah untuk perkebunan semakin meluas. Ini dikarenakan setelah adanya jaringan irigasi modern pihak perkebunan atau onderneming semakin gencar dalam menanam tanaman tebu, sehingga pihak perkebunan membutuhkan tanah yang lebih luas, kemudian tanah para petani yang menjadi sasarannya. Dalam mengatasi hal ini, di wilayah Klaten dibuatlah sistem giliran. Sistem giliran ini biasanya membagi tanah pertanian menjadi 2 atau 3 bagian. Pada petak sawah yang pertama dipakai oleh perkebunan tebu selama 16 sampai 18 bulan, kemudian untuk petak sawah kedua biasanya ditanami padi dan dipergunakan untuk perkebunan tebu sebelum petak sawah pertama panen.

Peran dari berbagai pihak pun dibutuhkan dalam mengelola sistem irigasi, supaya dapat berjalan dengan lancar. Selain dari pihak pegawai Waterschap Dengkeng yang mengatur

alur dari pengairan, peran dari desa serta masyarakat Klaten perlu dibutuhkan. Peran dari desa salah satunya ialah berkoordinasi dengan petugas Waterschap Dengkeng mengenai pengairan di setiap daerah. Adapun peran lain dari petinggi desa yang sering dilakukan ialah membuat laporan harian untuk diserahkan kepada pemerintah. Selain itu, petinggi desa juga harus siap menerima kritik serta saran dari masyarakat Klaten mengenai saluran irigasi, misalnya ketika masyarakat meminta perbaikan saluran irigasi di suatu daerah di Klaten. Bagi masyarakat Klaten, peran yang paling kentara ialah menjadi buruh pekerja dan dalam hal mengelola tanah, sebab tugas menjadi buruh diperkebunan menentukan hasil dari panen tebu itu sendiri, di samping itu tanah yang subur akan membuat hasil perkebunan maupun pertanian menjadi baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip:
BPAD DIY, *Notulen Van de 51e Vergadering Van het Bestuur van het Waterschap "Dengkeng" van 10 April 1926, gehouden in het gebouw van het Secretariat van het Waterschap "Dengkeng", des voor middage om half negen.*
- BPAD DIY, *Notulen Van de 52e Vergadering Van het Bestuur van het Waterschap "Dengkeng" van 20 April 1926, gehouden in het gebouw van het Secretariat van het Waterschap "Dengkeng", des voor middage om half negen.*
- BPAD DIY, *Notulen Van de 54e Vergadering Van het Bestuur van het Waterschap "Dengkeng" van 3 Juli 1926, gehouden in het gebouw van*

het Secretariat van het Waterschap "Dengkeng", des voor middage om half negen.

Buku

Abdurrahman Surjomihardjo, Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930, Jakarta: Komunitas Bambu, 2000.

Abdurrahman

Badan Pu

Booth, An

Booth, Eff

Breman, J

Dadang

Daliman,

De Vries

Effendi

Geertz, C

Helius

Jasper, J.E., *Memori Serah Jabatan 1921-1930; Jawa timur dan Tanah Kerajaan*, Jakarta: ANRI, 1978.

Kuntowijoyo, *Metodelogi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Metz, Th.M., *Seorang Praja Jawa, Beberapa Pandangan*

Waterschap Dengkeng ... (Khairunisa Putri N.)

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

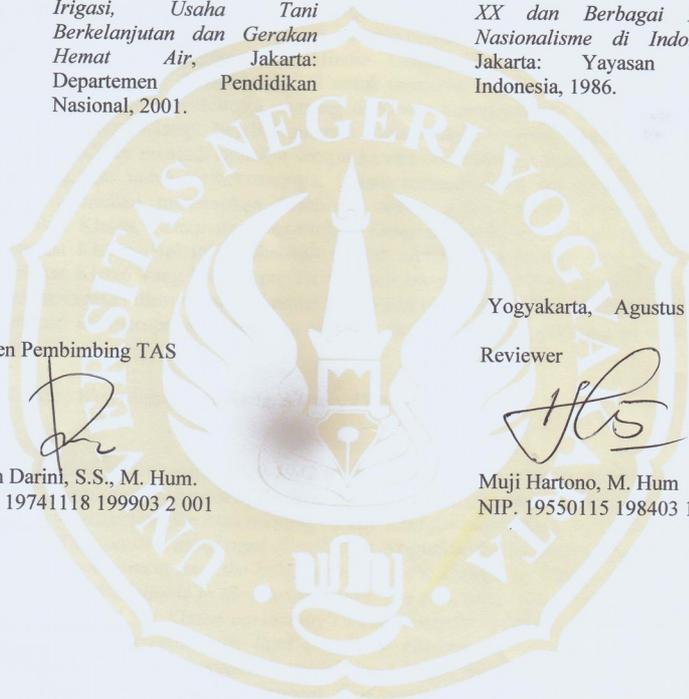
Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Suprodjo Pusposutardjo, *Pengembangan Irigasi, Usaha Tani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

Theresia Trisundari R., *Tata Kelola Pengairan di Yogyakarta dan Surakarta 1926-1933: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: BPAD DIY, 2014.

Yasuo, Uemura., "Perkebunan Tebu dan Masyarakat Pedesaan di Jawa", Akira Nagazumi, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.



Yogyakarta, Agustus 2019

Dosen Pembimbing TAS

Reviewer

Ririn Darini, S.S., M. Hum.
NIP. 19741118 199903 2 001

Muji Hartono, M. Hum
NIP. 19550115 198403 1 001